

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi kontemporer, perkembangan dunia mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam bidang hubungan internasional. Globalisasi telah mengubah cara negara berinteraksi satu sama lain, khususnya melalui praktik diplomasi. Melalui jalur diplomasi, sebuah negara dapat membentuk citra dirinya sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Seiring dengan semakin eratnya keterkaitan antara globalisasi dan diplomasi, praktik diplomasi tidak lagi bersifat eksklusif dan terbatas pada aktor negara semata. Diplomasi yang sebelumnya didominasi oleh *state actors* kini mengalami perluasan dengan hadirnya *non-state actors*, seperti pihak swasta, kelompok masyarakat, dan individu yang turut berperan aktif dalam aktivitas diplomasi di tingkat internasional (Nurika, 2017).

Salah satu aktor non-negara yang semakin menonjol dalam praktik diplomasi adalah peranan warga negara yang kemudian fenomena ini melahirkan konsep *citizen diplomacy*, yakni keterlibatan warga negara secara langsung dalam aktivitas lintas batas yang berkontribusi pada hubungan antarbangsa (Mutmainah, 2014, p. 124). *Citizen diplomacy* sendiri menekankan peran individu dan komunitas sebagai aktor yang mampu membangun komunikasi lintas budaya, memperkenalkan nilai dan identitas nasional, serta menciptakan pemahaman bersama dengan masyarakat asing. Meskipun bersifat non-formal, praktik *citizen*

diplomacy kerap berjalan secara komplementer atau saling melengkapi dengan diplomasi negara dalam membangun citra positif suatu negara di mata internasional (Mutmainah, 2014, p. 125).

Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa internasional menjadi salah satu aktor penting dalam praktik *citizen diplomacy*. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri tidak hanya membawa identitas akademik, tetapi juga identitas kebangsaan yang secara tidak langsung merepresentasikan negara asalnya melalui interaksi sehari-hari, kegiatan sosial, serta penyelenggaraan acara budaya, mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki posisi strategis dalam memperkenalkan budaya dan nilai negaranya kepada masyarakat lokal (Eqzaputri et al., 2025).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah mahasiswa luar negeri yang besar, memiliki potensi signifikan dalam memanfaatkan peran organisasi mahasiswa diaspora sebagai aktor *citizen diplomacy*. Per tahun 2025, Australia adalah salah satu tujuan paling populer bagi mahasiswa Indonesia, dengan rekor sebanyak 24.000 mahasiswa Indonesia belajar di negara ini (Autralian Embassy Indonesia, 2025). Salah satu organisasi non-profit yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Australia adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 8 Maret 1981 di Kota Canberra, Australian Capital Territory. Pendirian PPIA dilandasi oleh semangat persatuan pelajar Indonesia di Australia yang ingin bersatu dalam satu wadah resmi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (PPI Australia, 2024). Seiring dengan bertambahnya jumlah pelajar Indonesia yang tersebar di berbagai

negara bagian, PPIA kemudian berkembang menjadi organisasi berjenjang tiga tingkatan, yakni PPIA Pusat di tingkat nasional, PPIA Cabang di tingkat negara bagian, dan PPIA Ranting di tingkat universitas. Dalam struktur tersebut, PPIA Queensland hadir sebagai salah satu dari delapan cabang tingkat negara bagian yang menaungi pelajar Indonesia di Queensland, Australia (PPI Australia, n.d.).

Sebagai organisasi cabang, PPIA Queensland yang berdiri pada tahun 1988 PPIA Queensland mengemban fungsi sebagai wadah pemersatu sekaligus fasilitator bagi seluruh pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Queensland. Di bawah naungan PPIA Queensland, terdapat empat ranting aktif yang beradada di Queensland, yaitu University of Queensland Indonesian Student Association (UQISA), Indonesia Student Association of Queensland University of Technology (ISAQ), Indonesian Student Association of Griffith University (ISAGU), Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia James Cook University (PPIA JCU) (PPIA Queensland, n.d.).

PPIA Queensland merupakan organisasi mahasiswa Indonesia yang mewadahi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di wilayah negara bagian Queensland, Australia. PPIA Queensland berada di bawah naungan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) sebagai organisasi induk di tingkat nasional Australia yang telah beridiri sejak 1981 (PPI Australia, n.d.). Keberadaan PPIA Queensland bertujuan untuk menjadi ruang berkumpul, koordinasi, serta pengembangan kapasitas mahasiswa Indonesia, baik dalam bidang akademik, sosial, maupun budaya, selama menjalani studi di Australia.

Tabel 1. 1 Komparasi Organisasi PPIA dan Jumlah Pelajar Indonesia di Australia

Organisasi PPIA	Negara Bagian	Jumlah Ranting Aktif	Jumlah Pelajar Indonesia
PPIA New South Wales	New South Wales	8	15.856
PPIA Victoria	Victoria	6	9.428
PPIA Western Australia	Western Australia	4	2.282
PPIA Queensland	Queensland	5	1.947
PPIA South Australia	South Australia	3	619
PPIA Australia Central Territory	ACT	3	450

Sumber: (Australia Government Department of Education, 2026)

Berdasarkan tabel komparasi di atas, dapat dilihat bahwa dari sisi jumlah pelajar Indonesia, Queensland menempati posisi keempat dengan 1.947 pelajar, di bawah New South Wales dengan 15.856 pelajar, Victoria dengan 9.428 pelajar, dan Western Australia dengan 2.282 pelajar. Namun demikian, jumlah anggota yang tidak lebih besar justru tidak menjadikan PPIA Queensland kurang menarik untuk diteliti. PPIA Queensland, meskipun bukan yang terbesar, adalah organisasi yang representatif untuk menganalisis praktik *citizen diplomacy* karena mampu menjalankan peran sebagai representasi kepentingan ekonomi lokal, advokat budaya Indonesia, sekaligus aktor mandiri dalam hubungan internasional. Sebagai organisasi mahasiswa PPIA Queensland memiliki banyak program kerja yang bermanfaat baik untuk mahasiswa, diaspora, dan masyarakat lokal. Program

tersebut seperti, PPIA Card, Promosi pelaku usaha di Australia, Warung Konsuler, *Indonesia Student Assembly*, dan Pesta Rakyat (PESRA).

Di luar faktor organisasi, Queensland sendiri sebagai wilayah memiliki keunikan dan nilai strategis tersendiri. Brisbane, ibu kota Queensland, telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2032 (DW.com, 2021). Ajang ini dinilai sebagai kesempatan besar bagi Australia untuk menunjukkan *soft power* nya di hadapan dunia melalui tema yang dibawakan “*Believe. Belong. Become. Brisbane 2032*” (International Olympic Commite, 2025). Dalam konteks hubungan bilateral, University of Queensland (UQ) sendiri telah menjalin kemitraan dengan Indonesia selama lebih dari 50 tahun, mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pertukaran budaya. menjadikan Queensland sebagai salah satu simpul terpenting dalam hubungan Indonesia-Australia (The University Of Queensland, n.d.). Dengan kata lain, Queensland adalah wilayah yang sedang naik daun secara geopolitik dan juga memiliki keterikatan historis yang kuat dengan Indonesia. Keberadaan PPIA Queensland di tengah dinamika ini menjadikannya objek penelitian yang relevan dan strategis dalam menggambarkan bagaimana praktik citizen diplomacy berjalan di wilayah yang semakin penting bagi hubungan kedua negara.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian atau karya tulis terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian pertama merujuk pada Nurshabrina & Utomo (2024) menganalisis peran aktor non-negara, khususnya pemuda, dalam praktik *citizen diplomacy* melalui program *Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP)*

pada periode 2020-2022. Dalam artikelnya menunjukkan bahwa AIYEP berfungsi sebagai instrumen *soft diplomacy* yang efektif dalam memperkuat *people to people contact* antara Indonesia dan Australia, terutama di tengah keterbatasan interaksi akibat pandemi Covid-19. Dengan menggunakan konsep *citizen diplomacy* dari Paul Sharp, penulis menjelaskan bahwa keterlibatan pemuda sebagai aktor non-negara mampu menjembatani komunikasi lintas budaya, membangun hubungan emosional, serta membantu memulihkan dan menjaga hubungan bilateral kedua negara pasca ketegangan politik di masa lalu. Esensi program AIYEP tercermin melalui kegiatan pertukaran budaya, diskusi isu global, dan kolaborasi proyek sosial yang berkontribusi pada peningkatan citra positif dan saling pengertian antar masyarakat (Nurshabrina & Utomo, 2024).

Penelitian kedua, artikel oleh Damayanti et al., (2025) dijelaskan didalamnya bahwa diplomasi budaya tidak hanya dijalankan oleh negara atau diaspora di luar negeri, tetapi juga dapat berlangsung *dari pinggiran* melalui peran mahasiswa diaspora di dalam negeri. Studi ini menunjukkan bahwa mahasiswa diaspora Malaysia-Indonesia (SASAJO), khususnya anak-anak Pekerja Migran Indonesia, memiliki identitas hibrida yang justru menjadi modal penting dalam mendorong multikulturalisme dan dialog antarbudaya di lingkungan kampus Yogyakarta. Melalui program pengabdian masyarakat berbasis partisipatif dan pendekatan interdisipliner (psikologis dan hubungan internasional), mahasiswa diaspora diberdayakan sebagai aktor diplomasi budaya akar rumput yang mampu membangun inklusi sosial, memperkuat toleransi, serta merepresentasikan citra Indonesia yang multikultural secara informal (Damayanti et al., 2025).

Penelitian ketiga merujuk artikel Arifin & Herningtyas (2025) yang membahas peran kampanye digital berbasis *citizen diplomacy* yang dilakukan oleh Pandawara Group Indonesia dan Sài Gòn Xanh Vietnam dalam menginisiasi aksi pembersihan lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah, khususnya sampah plastik, merupakan isu lingkungan global yang tidak cukup ditangani hanya oleh negara, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Melalui pemanfaatan media sosial, Pandawara Group berhasil membangun gerakan lingkungan yang tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga menginspirasi komunitas lintas negara, seperti Sài Gòn Xanh di Vietnam. Kerja sama kedua komunitas ini mencerminkan praktik *citizen diplomacy*, di mana warga negara berperan langsung dalam membangun hubungan transnasional dan mendorong partisipasi publik melalui aksi nyata dan kampanye digital (Arifin & Herningtyas, 2025).

Penelitian keempat, menurut artikel Lestari & Hartati (2023) membahas peran komunitas diaspora Indonesia sebagai aktor non-negara dalam praktik diplomasi budaya melalui penyelenggaraan *Indonesia Sunday Market (ISM)* di Ho Chi Minh City, Vietnam. Di dalam artikel ini menunjukkan bahwa diaspora Indonesia mampu berperan aktif dalam memperkenalkan budaya, produk, dan identitas nasional Indonesia kepada masyarakat Vietnam melalui kegiatan budaya berbentuk pameran dan festival yang dibahas dengan pendekatan diplomasi budaya dari pemikiran Milton C. Cummings (2009) bahwa diplomasi budaya itu adalah bentuk pertukaran ide, gagasan, pemikiran, informasi, kesenian, dan aspek kebudayaan lainnya yang ditujukan untuk menjaga sikap saling pengertian (*mutual*

understanding). Sehingga momentum ISM dijadikan sebagai sarana pertukaran ide, seni, dan nilai budaya yang bertujuan membangun *mutual understanding* antara masyarakat Indonesia dan Vietnam. Selain meningkatkan pemahaman lintas budaya, kegiatan ISM juga memberikan manfaat ekonomi melalui promosi produk Indonesia serta memperkuat citra positif Indonesia di luar negeri (Lestari & Hartati, 2023).

Kemudian penelitian terakhir, menurut artikel Kurniawan et al., (2019) menjelaskan bahwa diaspora Indonesia di Amerika Serikat berperan sebagai aktor non-negara dalam *gastrodiplomasi* yaitu penggunaan budaya kuliner Indonesia untuk membangun *brand awareness* negara di luar negeri melalui kegiatan festival makanan yang digelar, misalnya oleh Kedutaan Besar RI di New York. Kelompok diaspora seperti Indonesian Diaspora Network (IDN) USA aktif terlibat dalam festival kuliner dan pameran budaya yang tidak hanya memperkenalkan makanan tradisional Indonesia kepada warga lokal, tetapi juga meningkatkan interaksi antarbudaya dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan masyarakat Amerika Serikat. Melalui partisipasi dalam acara seperti food festival dan bazar, diaspora membantu menyebarkan citra positif Indonesia serta membuka peluang ekonomi, seperti pengembangan bisnis kuliner Indonesia di luar negeri yang dapat berkontribusi pada perluasan pasar pariwisata dan ekonomi Indonesia secara global (Kurniawan et al., 2019).

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa praktik *citizen diplomacy* telah banyak dikaji melalui berbagai aktor dan media. Namun, belum ada yang mengkaji mengenai peranan Perkumpulan Pelajar

Indonesia di Queensland. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran PPIA Queensland sebagai organisasi komunitas pelajar Indonesia di Australia yang berperan sebagai *citizen diplomat*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis diatas maka rumusan masalah yang relevan adalah "**Bagaimanakah peran PPIA Queensland sebagai *citizen diplomat* di Australia tahun 2020-2025?**"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai pemenuhan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menunjukkan bagaimana peran PPIA Queensland sebagai *citizen diplomat* Indonesia di Australia tahun 2020-2025.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Citizen Diplomacy

Citizen diplomacy merujuk pada aktivitas keterlibatan warga biasa dalam interaksi lintas negara yang sebelumnya didominasi oleh aktor negara dan diplomat resmi (Mutmainah, 2014). Sebuah konsep yang awalnya bersifat elitis dan *state-centric* mulai membuka ruang partisipasi bagi individu, komunitas, serta aktor non-negara. Partisipasi warga biasa (*layman*) dalam diplomasi mencerminkan meningkatnya kesadaran global masyarakat dan semakin intensnya interaksi lintas batas, yang memungkinkan warga negara terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas hubungan internasional (Mutmainah, 2014, pp. 123-124). Meskipun menempatkan warga biasa sebagai aktor penting, *citizen diplomacy* tidak sepenuhnya terlepas dari peran negara. Dalam praktiknya, menurut Sherry Mueller dalam Mutmainah (2014) bahwa aktivitas *citizen diplomacy* sering kali bersifat komplementer terhadap diplomasi berbasis negara (*state-based diplomacy*), di mana negara secara sadar melibatkan aktor non-negara untuk mendukung pencapaian kepentingan luar negerinya atau juga disebut “*one hand-at a time*” (Mutmainah, 2014). Sedangkan menurut Marshall, *citizen diplomacy* tidak sepenuhnya terlepas dari koordinasi negara, tetapi keterlibatan publik adalah sebuah keniscayaan. Mereka yang terlibat memiliki otonomi penuh dalam penanganan isu tertentu yang artinya, mereka tidak dipilih oleh negara tetapi mereka yang dinilai representatif atau mumpuni oleh masyarakat dalam menangani isu tertentu (Mutmainah, 2014).

Pemahaman yang lebih luas mengenai *citizen diplomacy* dikemukakan oleh Paul Sharp yang lahir dari sikap skeptis terhadap *citizen diplomacy* yang ditulis dalam artikel “*Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota as International Actors*,”. Sharp (2001) menawarkan 2 dimensi tipologi yaitu siapa atau apa yang direpresentasikan, serta kepada siapa representasi tersebut ditujukan. Dimensi pertama berkaitan dengan pihak atau entitas yang diwakili dalam praktik *citizen diplomacy*, yang dapat berupa individu itu sendiri, negara, kepentingan *sub-state*, *supra-state*, komunitas *trans-state*, maupun gagasan tertentu yang merepresentasikan kebijakan spesifik. Sementara itu, dimensi kedua berfokus pada pihak yang menjadi sasaran dari aktivitas diplomasi tersebut, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Berdasarkan kedua dimensi ini, Paul Sharp kemudian merumuskan lima tipologi yang menjelaskan beragam bentuk keterlibatan individu dan aktor non-negara dalam praktik *citizen diplomacy* yang menunjukkan beragam bentuk keterlibatan warga dalam diplomasi, mulai dari yang bersifat informal hingga yang relatif mandiri dari negara (Mutmainah, 2014, p. 127). Kelima tipologi tersebut antara lain,

Tipologi pertama adalah *the citizen diplomat as a go-between messenger*, di mana warga bertindak sebagai penghubung atau perantara komunikasi antara dua pihak yang sulit berinteraksi secara resmi, misalnya karena konflik atau gangguan hubungan diplomatik. Sharp menjelaskan dengan keterlibatan warga dalam posisi ini dapat membuka jalur komunikasi yang lebih santai dan personal dan dapat menghindarkan pemerintah dari dipermalukan (Sharp, 2001, p. 137). Tipologi kedua adalah *the citizen diplomat as a representative for a sectoral, regional, or*

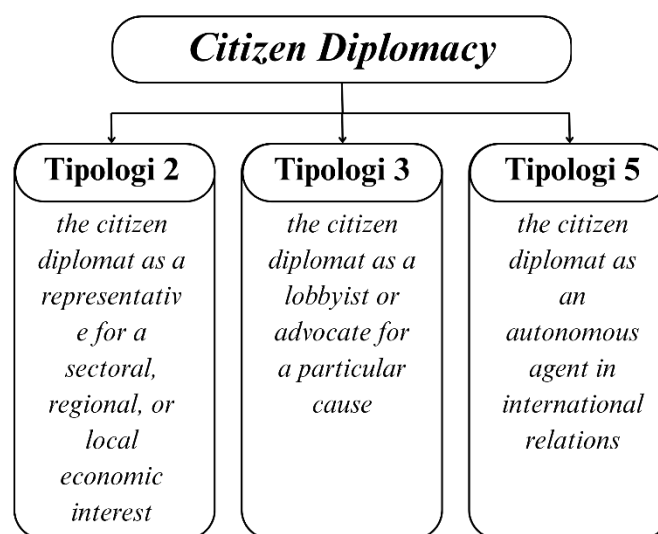
local economic interest, yaitu warga, komunitas, atau pelaku usaha di tingkat lokal yang terlibat dalam kepentingan ekonomi di tingkat lokal maupun regional. Dalam tipologi ini, warga menjalin kerja sama lintas negara untuk mendorong terbangunnya relasi ekohomi lintas negara secara pragmatis (Mutmainah, 2014, p. 130).

Tipologi ketiga adalah *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*, yaitu pada tipologi ini, warga terlibat dalam jaringan internasional untuk memperjuangkan isu tertentu, seperti perdamaian, hak asasi manusia, lingkungan, atau kemanusiaan. Sharp menjelaskan bahwa warga dalam peran ini berupaya memengaruhi kebijakan negara dan organisasi internasional melalui *lobbying* atau kampanye yang ditujukan membentuk opini publik dan arah kebijakan internasional dengan sasaran lobbying sendiri adalah pemerintah dan institusi internasional (Mutmainah, 2014, p. 130). Kemudian, tipologi keempat adalah *the citizen diplomat as a subverter or transformer of existing policies and/or political arrangements, domestic and/or international*, yaitu *citizen diplomats* atau warga tidak hanya mendukung atau memengaruhi kebijakan yang ada, tetapi juga secara aktif mengkritik dan berupaya mengubah kebijakan luar negeri atau tatanan politik yang dianggap tidak adil (oposisi). Warga juga dalam kategori ini sering terlibat dalam gerakan sosial dan solidaritas transnasional untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar dalam hubungan internasional.

Selanjutnya, tipologi terakhir adalah *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*, yaitu individu yang memiliki kemampuan dan sumber daya tertentu sehingga dapat bertindak relatif mandiri di tingkat

internasional. individu disini tidak selalu mewakili negara atau kelompok tertentu, tetapi dapat membangun relasi internasional atas nama dirinya sendiri. Tipologi ini menunjukkan bahwa individu juga dapat memiliki peran dan pengaruh yang signifikan, meskipun berada di luar struktur negara (Mutmainah, 2014, p. 133).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran
Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan konsep *citizen diplomacy* menurut Paul Sharp (2001), penelitian ini menggunakan tipologi 2: *the citizen diplomat as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*, dan 3: *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*, dan 5: *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*, untuk menganalisis peran Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Queensland (PPIAQ) sebagai *citizen diplomats*. Sementara itu, tipologi 1: *the citizen diplomat as a go-between messenger*, dan 4: *the citizen diplomat as a subverter or transformer of existing*

policies and/or political arrangements, domestic and/or international tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak ditemukan aktivitas PPIA Queensland yang menunjukkan peran sebagai pengganti diplomasi resmi negara atau sebagai penengah dalam konflik antarnegara.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Queensland (PPIA Queensland) menjalankan praktik *citizen diplomacy* yang dapat dipahami melalui tipologi *citizen diplomacy* yang dikemukakan oleh Paul Sharp (2001), khususnya tipologi *the citizen diplomat as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*, *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*, dan *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*.

Pertama, PPIA Queensland menjalankan peran sebagai *the citizen diplomat as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*. Peran ini terlihat dari program PPIA Card yang menghubungkan anggotanya dengan pelaku usaha Indonesia di Australia dan pelaku usaha lokal Australia yang di kenalkan melalui program promosi pelau usaha atau *partnership*. Melalui program-program ini, PPIA Queensland membantu mahasiswa Indonesia mengakses manfaat ekonomi sekaligus membangun hubungan yang saling menguntungkan antara mahasiswa Indonesia dengan para pelaku usaha yang terlibat.

Kedua, PPIA Queensland juga berperan sebagai *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*. Peran ini diwujudkan melalui beberapa program. Pertama melalui Webinar dan Forum diskusi di mana PPIA Queensland

membuka ruang diskusi bagi mahasiswa Indonesia untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan Indonesia seperti dibidang ekonomi, pendidikan, pengembangan SDM, politik, hukum, dan HAM yang hasil daripada kegiatan tersebut adalah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Indonesia. Kedua melalui Pesta Rakyat (PESRA), dimana PPIA Queensland mengadvokasi dengan memperkenalkan budaya dan identitas Indonesia kepada masyarakat Australia melalui sebuah festival. Ketiga melalui Warung Konsuler, dimana PPIA Queensland membantu kebutuhan WNI di Queensland yang selama ini kesulitan mengakses layanan konsuler akibat tidak adanya kantor KJRI permanen di Queensland, sehingga PPIA Queensland hadir sebagai pihak yang aktif mengadvokasi pemenuhan hak-hak administratif WNI kepada pemerintah Indonesia. Semua program ini secara bersama-sama menjadi sarana PPIA Queensland dalam membangun pemahaman positif tentang Indonesia sekaligus memperjuangkan kepentingan komunitasnya di Australia.

Ketiga, PPIA Queensland juga menunjukkan peran sebagai *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*, di mana organisasi ini memiliki kapasitas dan otonomi dalam merancang, mengelola, dan menjalankan berbagai programnya secara mandiri sebagai organisasi mahasiswa diaspora. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dijalankan murni atas inisiatif mereka sendiri. Meskipun demikian, otonomi tersebut tetap berjalan berdampingan dengan koordinasi dan dukungan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah lokal Australia. Hal ini menunjukkan bahwa PPIA Queensland menjalankan praktik

citizen diplomacy yang bersifat mandiri sebagai aktor non-negara, namun tetap bersifat komplementer terhadap diplomasi resmi negara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution (2023) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, penelitian kualitatif merupakan suatu proses ilmiah yang berupaya memahami makna fenomena sosial dalam konteks yang alami, dengan menekankan pada makna, proses, dan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Selanjutnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis, karena data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, ungkapan, atau narasi, bukan angka. Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses penelitian, sehingga dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas terhadap konteks yang sedang dikaji (Nasution, 2023). Selain itu, penelitian kualitatif menekankan pada kualitas dan keabsahan data yang didapatkan dari observasi sumber-sumber terpercaya (Adlini et al., 2022).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan waktu pada periode tahun 2020 hingga 2025. Dalam periode tersebut, PPIA Queensland menjalankan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan mahasiswa Indonesia, diaspora, serta masyarakat lokal Australia. Dengan jangkauan waktu ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana peran dan kontribusi PPIA Queensland sebagai aktor *citizen diplomat*

dalam berbagai kegiatan yang dijalankan dengan batasan akhir tahun 2025 sebagai batas akhir penelitian sesuai dengan batasan waktu dan ketersediaan data penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber primer dan sekunder. Data primer menurut Nasution (2023) yaitu, berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel karena akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang biasanya didapatkan dari hasil wawancara. Data primer akan didapatkan melalui wawancara bersama ketua PPIA Queensland 2025 yaitu Bapak Zakiyudin. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan dengan cara membaca berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, publikasi media massa, dan media sosial dari PPIA Queensland @ppiaqueensland. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisa oleh penulis untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai judul yang sedang penulis teliti.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan dan berulang. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memanfaatkan seluruh informasi yang berhasil dihimpun penulis dari dua sumber utama, yakni hasil wawancara langsung dengan narasumber serta dari berbagai literatur pendukung. Setelah data-data terkumpul akan diproses lebih lanjut secara mendalam oleh penulis untuk kemudian diinterpretasikan, dihubungkan satu sama lain, dan dikembangkan

menjadi sebuah pemahaman utuh yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sofwatillah et al., 2024) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan:

1. Reduksi Data, proses ini dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.
2. Penyajian Data, setelah data dikerucutkan, informasi yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antarunsur.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, tahap terakhir adalah menyimpulkan temuan penelitian dan memverifikasi kembali agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kembali data dari berbagai literatur agar konsisten satu sama lain.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Terdapat beberapa urutan dalam sistematika penulisan penelitian ini, yakni disusun kedalam empat bab, yaitu

Bab I: Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, latar belakang, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian. serta sistematika penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II: Bab kedua ini berisi pembahasan mengenai praktik *citizen diplomacy* PPIA Queensland sebagai *citizen diplomat as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*.

Bab III: Bab kedua ini berisi pembahasan mengenai praktik *citizen diplomacy* PPIA Queensland sebagai *citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause*, dan *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*.

Bab IV: Bab keempat akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan dalam pengembangan praktik *citizen diplomacy* Indonesia.